

**PERILAKU NON-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PADANG
PERIODE 2008-2013
(Studi Kasus di Kecamatan Koto Tengah)**

Aina

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Email : *aina53_pkn@gmail.com*

Abstract

The direct provincial and mayoral election often witnesses the tendency of low voter turnout, as happened in Padang city mayoral election in 2008. This research seeks to reveal the non-voting behavior and the causes of the behavior in Koto Tengah district, which has the lowest voter turnout; 42.51%. This research is a descriptive-qualitative where data is obtained by using in-depth interview technique and documentation study. Snowball sampling is used to select sample of voters who vote in Padang 2008 election. The data was then analyzed using qualitative method. The result shows that there were two types of non-voting behavior in Koto Tengah community in Padang 2008 mayoral election; (1) did not come to the ballot box; (2) did come to the ballot box but did not cast ballots properly. The behavior was caused by several factors; (1) psychological factor; (2) factor of political system; (3) factor of political trust; and (4) factor of socio-economic status. Psychological factor means non-voters' characters tend to be apathetic and ignorant of politics. In terms of political system factor, non-voting behavior was driven by dissatisfaction with the government's performance which showed no change. Political trust factor showed that most non-voters do not believe in the processes and results of the local elections. Meanwhile, in socio-economic status, most non-voters are educated. On the other hand, employment and income also contributed to the non-voting behavior.

Key words: *direct local election, Padang mayoral election, low voter turnout, non-voting behavior*

Pendahuluan

Salah satu perubahan yang mendasar dari format politik Indonesia pasca reformasi 21 Mei 1998 dalam hal pemilihan kepala daerah tidak lagi melalui pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melainkan melalui pemilihan umum (pemilu) kepala daerah secara langsung. Melalui pemilu kepala daerah langsung diharapkan akan terpilih kepala daerah dari kandidat terbaik yang lebih kredibel, kapabel dan aspiratif sesuai dengan keinginan masyarakat. Joko Prihatmoko (2005) menjelaskan pemilu kepala daerah langsung memiliki beberapa segi positif, yaitu: (1) kepala daerah akan memiliki mandat dan legitimasi ; (2) pemilu kepala daerah langsung memberikan proses pendidikan politik bagi masyarakat terutama tentang peran debat publik, sistem seleksi calon, visi dan misi, kebijakan,

perencanaan dan anggaran dalam suatu sistem demokrasi; (3) terjadinya *political equality* atau kesetaraan politik terutama dalam hal pemberian suara, proses pembuatan kebijakan maupun dalam melakukan implementasi dan evaluasi kebijakan; (4) terdapatnya akuntabilitas publik karena pemilu kepala daerah secara langsung lebih *accessible* terhadap penduduk setempat karena kepala daerah yang terpilih akan lebih bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan dan hasilnya; dan (5) pemilu kepala daerah langsung dapat meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat dan bagaimana kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara-cara yang efektif. Tujuan utama pemilu kepala daerah langsung adalah penguatan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi lokal. Di sisi lain, pemilu kepala daerah langsung memberikan

Perilaku Non-Voting...

kesempatan kepada rakyat untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, karena kepala daerah dipilih oleh rakyat daerah itu sendiri.

Pemilu kepala daerah langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang yang diselenggarakan tanggal 23 Oktober 2008 merupakan sarana untuk mewujudkan aspirasi masyarakat di tingkat lokal. Pemilu kepala daerah ini merupakan momen yang berarti bagi masyarakat Kota Padang karena pertama kalinya masyarakat memilih secara langsung kandidat yang diinginkannya untuk mengisi jabatan tersebut. Disamping itu perubahan kedua UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.12 tahun 2008 memberikan peluang bagi kandidat dari luar partai yang dikenal dengan calon independen sebagai calon alternatif. Ketentuan ini idealnya semakin mendorong masyarakat memilih untuk menggunakan hak suaranya saat pemilu kepala daerah berlangsung. Namun kenyataannya tingkat kehadiran masyarakat (*voting turn out*) dalam pemilu kepala daerah ternyata hanya menunjukkan angka 51%, jauh lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif 2009 sebesar 63,54% dan pemilu presiden yang tingkat kehadiran pemilihnya 62,35%. Dari persentase kehadiran pemilih tersebut terlihat kecenderungan orang untuk tidak memilih (golput) terlihat semakin menguat.

Terkait dengan penggunaan hak pilih dalam pemilu kepala daerah langsung dari Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008-2013, data yang ada menunjukkan bahwa sejumlah 43,20% pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap ternyata tidak menggunakan hak pilihnya (KPU Kota Padang, 2008). Di Kecamatan Koto Tengah yang menjadi lokasi penelitian ini, fenomena yang sama juga terjadi. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Koto Tengah dalam pemilu kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang yaitu sebesar 42,51%. Banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2008 di Kecamatan Koto Tengah ternyata juga terjadi pada pemilu legislatif 2009 yaitu sebesar 39,13%. Dengan kata lain di kecamatan ini tingkat ketidakhadiran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya merupakan yang tertinggi di Kota Padang pada dua pemilu tersebut (KPU Kota Padang, 2008).

Tingkat kehadiran pemilih (*voting turn*

out) di atas bila dibandingkan dengan rata-rata yang terjadi di negara-negara demokratis di seluruh dunia yaitu 64% masih di bawah angka rata-rata. Sejalan dengan hasil penelitian Lipset bahwa berdasarkan data pemilu di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat seperti Jerman, Swedia, Norwegia, serta Finlandia dimana masyarakat kota memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat desa (Miriam Budiardjo, 1998).

Berangkat dari pemaparan sebelumnya menarik dilakukan penelitian tentang penyebab perilaku *non-voting* dalam pemilihan kepala daerah langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008-2013 di Kecamatan Koto Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: (1) Bentuk perilaku *non-voting* dalam pemilu kepala daerah langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2008-2013 di Kecamatan Koto Tengah; dan (2) Latar belakang terjadinya perilaku *non-voting* dalam pemilu kepala daerah langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2008-2013 di Kecamatan Koto Tengah ditinjau dari faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik, dan faktor status sosial ekonomi.

Kajian Pustaka ***Partisipasi Politik***

Partisipasi secara harafiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan kebijakan (keputusan) sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Selanjutnya dalam analisis politik modern, partisipasi politik termasuk masalah yang penting sekaligus pelik. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya *No Easy Choice : Political Participation in Developing Countries (1976)* menggambarkan partisipasi politik sebagai kegiatan warganegara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Pendapat yang senada dikemukakan oleh Norman H. Nie dan Sidney Verba sebagaimana dikutip Greenstein (1975) bahwa partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan pribadi warganegara yang legal dan sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil mereka.

Dengan demikian partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sedangkan asumsi yang mendasari masyarakat harus mempunyai partisipasi politik adalah karena mereka yang paling tahu tentang apa yang paling baik untuk dirinya, karena pada akhirnya keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah akan mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat tersebut.

Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Roth dan Frank L. Wilson dalam bukunya *The Comparative Study of Politics* (1976) membuat tipologi partisipasi politik atas dasar piramida partisipasi. Pandangan Roth dan Wilson tentang piramida partisipasi politik menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat aktifitas politik seseorang maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat di dalamnya. Jadi urutannya mulai dari yang terendah adalah: (1) orang yang apolitis; (2) pengamat; (3) partisipan; dan (4) aktivis. Robert D. Putnam sebagaimana dikutip oleh Mohtar Mas'ood dan MacAndrew (1981) juga membuat suatu model skematis stratifikasi sosial politik mulai dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling tinggi sebagai berikut: (1) non-partisan; (2) kaum pemilih; (3) publik peminat politik; (4) aktivis; (5) kaum berpengaruh; dan (6) kelompok pembuat keputusan. Pada puncak piramida terletak kelompok pembuat keputusan yaitu individu-individu yang secara langsung terlibat dalam pembuatan kebijakan nasional. Lapisan di bawahnya adalah kaum berpengaruh yaitu individu-individu yang memiliki pengaruh tidak langsung atau implisit yang kuat. Lapisan ketiga adalah lapisan aktivis yaitu warga negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Lapisan berikutnya adalah publik peminat politik yaitu orang-orang yang memberikan perhatian lebih terhadap masalah-masalah pemerintahan dan kemasyarakatan. Lapisan selanjutnya adalah merupakan kelompok pemilih dan lapisan terbawah adalah non partisan yaitu mereka yang tidak melakukan kegiatan politik.

Bentuk Perilaku Non-Voting dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya

Non-voting yang dalam perpolitikan di

Indonesia disebut dengan istilah golongan putih (golput) mulai populer di era tahun 1970-an yang dipelopori oleh Arif Budiman (Sri Yanuarta, 2009). Golongan ini timbul akibat ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu Orde Baru. Golput pada hakekatnya terdiri dari dua macam yaitu golput ideologis dan golput administratif. Golput ideologis adalah pemilih yang sengaja tidak memilih karena alasan-alasan politis. Sedangkan golput administratif lebih karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau suara tidak sah.

Dibandingkan negara-negara lain, jumlah kehadiran pemilih pada pemilu masa Orde Baru rata-rata di atas 90%. Angka ini hanya dijumpai pada negara-negara komunis yang menerapkan hukum wajib coblos seperti Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Polandia, Rumania, Cekoslawakia, Guinea, dan sebagainya. Di negara-negara ini jumlah kehadiran pemilih mendekati 100%. Sementara di negara-negara dunia ketiga, rata-rata kehadiran pemilih sangat rendah. Bahkan di negara Kuwait, Amerika Selatan, Malawi dan Bahrain angka kehadiran pemilih di bawah 20% (Sherman dan Aliza Kolker, 1987). Dalam suatu negara yang menerapkan hukum wajib coblos, seseorang akan memperoleh sanksi atau denda jika tidak menghadiri pemilu. Padahal dalam realitasnya tidak semua pemilih menyukai partai atau kandidat yang sedang bertarung dalam pemilu. Akibatnya mereka harus mendatangi tempat pemungutan suara untuk sekepala daerah menghindari sanksi atau denda, namun tidak mencoblos kartu suara atau bahkan merusaknya (Power, 1995).

Perilaku non-voting di Indonesia tidak jauh berbeda dengan fenomena di atas. Perilaku non-voting dimanifestasikan dalam berbagai bentuk yaitu: *Pertama*, orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu dan sistem politik yang ada. *Kedua*, orang yang menghadiri tempat pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan menusuk lebih dari satu tanda gambar. *Ketiga*, orang yang menggunakan hak pilihnya dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Dalam konteks semacam ini perilaku non-voting adalah refleksi protes atas ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan. *Keempat*, orang yang tidak hadir di tempat pemungutan suara dikarenakan mereka memang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak

Perilaku Non-Voting...

suara (Sri Yanuarti, 2009).

Kekhawatiran terhadap rendahnya kehadiran pemilih dalam pemilu ditenggarai oleh beberapa hal. *Pertama*, kehadiran pemilih seringkali ditafsirkan sebagai bentuk loyalitas atau kepercayaan pada sistem politik yang ada, sehingga ketidakhadiran diinterpretasikan sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada sistem politik atau rezim yang sedang berjalan. *Kedua*, adanya kecenderungan naiknya angka ketidakhadiran memilih di beberapa negara dalam dekade terakhir ini (M. Asfar, 1998).

Di Indonesia sendiri ketidakhadiran pemilih dalam pemilu-pemilu pasca reformasi politik juga mengalami kenaikan yang signifikan. Di tingkat nasional pada pemilu pertama sejak reformasi politik yaitu pemilu 1999 angka golput hanya berkisar 10%, pemilu 2004 angka golput mencapai 28,34% atau naik hampir tiga kali lipat atau 300%. Sementara pada pemilu 2009 angka golput menjadi 29,01%. Pada level daerah fenomena yang sama juga terjadi. Di Sumatera Barat, misalnya untuk kasus Kota Padang, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif 2004 berkisar di atas 30%. Pada pemilu presiden tahun 2004 naik mencapai 40%, bahkan pemilu kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar pada tahun 2005 naik menjadi 48% dan pemilu kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota naik kembali menjadi 49%.

Pengertian golput yang lebih rinci dikemukakan oleh M. Asfar (1998) yaitu: (1) orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu atau sistem politik yang ada; (2) orang yang menghadiri tempat pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar, seperti menusuk lebih dari satu gambar; (3) orang yang menggunakan hak pilihnya tetapi menusuk pada bagian putih dari kartu suara; dan (4) orang yang tidak menggunakan hak suara karena tidak adanya motivasi untuk memilih. Dalam tesis ini pengertian golput merujuk pada pengertian yang disampaikan oleh M. Asfar dan tidak termasuk pemilih yang tidak memilih karena faktor kelalaian atau situasi-situasi yang tidak bisa dikontrol oleh pemilih.

David Moon sebagaimana dikutip Sri Yanuarti (2009) menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan ketidakhadiran pemilih (non-voting) dalam suatu

pemilu. *Pertama*, menekankan pada karakter sosial dan psikologi pemilih serta karakteristik institusional sistem pemilu. Sementara pendekatan *kedua* menekankan harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih. Menurut kedua pendekatan tersebut setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tidak memilih yaitu faktor psikologis, sistem politik, kepercayaan politik, dan latar belakang sosial ekonomi.

Faktor Psikologis

Penjelasan non-voting dari faktor psikologi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kategori. *Pertama*, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. *Kedua*, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan, tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih. Sebab, apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, betapapun mungkin hal itu menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Dalam konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung, karena tidak berhubungan dengan kepentingannya.

Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitikberatkan faktor orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomi, dan alienasi.

Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan (stimulus) politik, atau adanya perasaan (anggapan) bahwa aktifitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung.

Anomi merujuk pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktifitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka

merasa tidak mungkin mampu mempengaruhi peristiwa atau kebijaksanaan politik. Bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik seringkali berada di luar kontrol para pemilih. Sebab, para terpilih biasanya menggunakan logika-logikanya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka jauh berada di luar jangkauan para pemilih. Perasaan powerlessness inilah yang disebut sebagai anomie.

Sedangkan alienasi berada di luar apatis dan anomie. Alienasi merupakan perasaan keterasingan secara aktif. Seseorang merasa dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh – terutama pengaruh baik – terhadap kehidupan seseorang. Bahkan pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai konsekuensi jahat terhadap kehidupan manusia. Jika perasaan alienasi ini memuncak, mungkin akan mengambil bentuk alternatif aksi politik, seperti melalui kerusuhan, kekacauan, demonstrasi dan sebagainya (M. Asfar, 1998).

Faktor Sistem Politik

Secara teoritis belum ada kesepakatan yang pasti adanya hubungan antara demokratis tidaknya sistem politik dengan kuantitas kehadiran atau ketidakhadiran pemilih dalam suatu pemilu. Kenyataan menunjukkan kehadiran dan ketidakhadiran dalam pemilu tidak secara jelas menunjukkan adanya hubungan kedua variabel tersebut. Misalnya di Amerika Serikat sebagai negara yang disebut kampiun demokrasi, jumlah kehadiran pemilih dalam pemilu tergolong rendah, rata-rata hanya 50% saja. Sebaliknya di negara-negara Eropa Barat seperti Italia, Denmark, Belgia, Austria, Jerman dan sebagainya, yang tingkat demokrasiya cukup baik, tingkat kehadiran pemilih mencapai 90% (SriYanuarti, 2009).

Salah satu hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara sistem politik dengan tingkat kehadiran pemilih adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Tingsten. Hasil studi Tingsten menyimpulkan bahwa di negara-negara yang menerapkan sistem pemilu atau sistem perwakilan berimbang (proporsional) seperti negara-negara Eropa Barat, rata-rata partisipasi pemilih cukup tinggi. Sementara negara-negara yang menerapkan sistem distrik, jumlah kehadiran pemilih relatif rendah. Hal ini

dikarenakan, dalam sistem perwakilan berimbang, perolehan kursi sangat tergantung pada proporsi jumlah suara pemilih. Sementara itu, dalam sistem distrik perolehan kursi sangat ditentukan oleh mayoritas suara yang diperoleh. Sehingga para pemilih yang menerapkan sistem proporsional mempunyai semangat yang lebih besar untuk memilih betapapun mereka menyadari partai atau kandidat yang dipilihnya akan kalah di wilayahnya, sebab suaranya tidak hilang karena digabungkan dengan perolehan suara di daerah pemilihan lainnya. Pandangan Tingsten ini barangkali dapat menjelaskan fenomena tingginya angka partisipasi politik dalam pemilu di negara-negara Eropa Barat (Sri Yanuarti, 2009).

Secara umum sistem politik adalah semua tindakan yang lebih kurang langsung berkaitan dengan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat. Dalam penelitian ini faktor sistem politik diartikan sebagai faktor-faktor yang menjadi alasan pemilih untuk golput dihubungkan dengan kondisi riil yang sedang berjalan.

Faktor Kepercayaan Politik

Dalam konteks perilaku non-voting, kepercayaan pada sistem politik yang ada dapat mempengaruhi tingginya angka ketidakhadiran pemilih. Konsep kepercayaan politik digunakan untuk menjelaskan keaktifan dan tidakaktifan (inactivity) seseorang dalam dunia politik. Tidakaktifan dalam konsep ketidakpercayaan politik sendiri selalu mengandung pengertian ganda. Pertama, tidakaktifan dapat diinterpretasikan sebagai ekspresi atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau sebagai ekspresi atas perasaan keterasingan (alienasi). Kediktatoran militer di masa Yunani misalnya, sulit untuk menghasilkan persentase pilihan “ya” yang cukup tinggi dalam suatu plebisit konstitusional yang diharapkan.

Pada sisi lain, tidakaktifan juga dapat diinterpretasikan sebagai ekspresi kepercayaan yang tinggi, dimana tidakaktifan seseorang dalam bilik suara menandakan bahwa mereka puas terhadap sistem politik yang ada, atau tidak khawatir dengan keadaan politik yang ada. Mereka baru aktif atau berpartisipasi apabila mereka benar-benar kecewa terhadap sistem politik atau keadaan yang ada (Sri Yanuarti, 2009).

Penelitian A. Gamson sebagaimana dijelaskan oleh M. Asfar (1998) menyatakan

Perilaku Non-Voting...

bahwa kepercayaan pada sistem politik yang ada dapat mempengaruhi tingginya angka ketidakhadiran pemilih. Misalnya, ada bukti kuat bahwa partisipasi dalam sistem politik meningkat pada saat terjadi krisis. Dengan begitu, ketidakaktifan seseorang menandakan bahwa mereka puas terhadap sistem politik yang ada, atau paling tidak khawatir terhadap keadaan yang ada. Mereka baru aktif atau berpartisipasi apabila mereka benar-benar kecewa terhadap sistem politik atau keadaan yang ada. Dalam kondisi demikian, ketidakaktifan merupakan suatu pertanda keyakinan atau kepercayaan terhadap sistem politik yang ada (M. Asfar, 1998).

Kepercayaan politik juga berhubungan dengan penilaian seseorang terhadap kinerja dan performance pemerintah. Apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan maupun dalam pelaksanaan pemerintahan dalam suatu sistem politik.

Faktor Latar Belakang Status Sosial Ekonomi

Setidaknya ada tiga indikator yang biasa digunakan untuk menjelaskan status sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pekerjaan. Wolfinger seperti yang dijelaskan M. Asfar (1998) menyimpulkan bahwa ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih. Pertama, tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan. Kedua, pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah. Para pegawai negeri atau pensiunan misalnya, menunjukkan tingkat kehadiran memilih lebih tinggi dibanding yang lain. Sebab para pegawai negeri ini sering terkena langsung dengan kebijakan pemerintah seperti kenaikan gaji, pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Ketiga, pendapatan yang tinggi

memudahkan orang untuk menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kehadiran selalu menunjukkan arah yang berlawanan. Pemilih yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu yang cukup tinggi. Sebaliknya, pemilih yang berpendidikan tinggi cenderung angka ketidakhadirannya dalam pemilu rendah.

Sementara itu hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat ketidakhadiran juga menunjukkan pola yang sama. Para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu cukup tinggi. Sebaliknya, para pemilih dengan latar belakang pendapatan tinggi cenderung angka ketidakhadirannya dalam pemilu rendah.

Tetapi beberapa kasus menunjukkan bahwa yang mempunyai "status menyilang" justru cenderung tidak memilih. Misalnya, seorang pemilih yang tingkat pendidikannya tinggi dan pendapatannya rendah, seorang pemilih yang berlatar belakang Islam-santri dari keluarga PPP namun bekerja sebagai PNS dan sebagainya.

Pendapat yang cukup sederhana dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab seseorang yang mempunyai hak pilih tidak ikut dalam pemilu disampaikan oleh Mc Closky. Hal ini secara detail dijelaskan oleh Miriam Budiardjo (1998) sebagai berikut: (1) bersikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai masalah politik; (2) karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tidak akan berhasil; dan (3) sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan dimana ketidakikutsertaan merupakan hal yang terpuji.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu kepala daerah) Langsung sebagai Implementasi Demokrasi

Pemilu kepala daerah langsung yang dilaksanakan sejak tahun 2005 merupakan proses pembelajaran kehidupan demokrasi paling besar sepanjang sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia. Eksperimentasi demokrasi pemilu kepala daerah langsung terus diupayakan menuju pengimplementasian nilai-nilai

demokrasi. Pilihan terhadap pemilu kepala daerah langsung menjadi momentum untuk mempertegas aura optimisme dalam lajur pengembangan dan penumbuhan demokrasi (Mufti Mubarak, 2005).

Menurut Joko Prihatmoko (2005) peluang untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilu kepala daerah langsung adalah: *Pertama*, adanya prinsip kedaulatan rakyat dimana melalui pemilu kepala daerah langsung rakyat akan menentukan sendiri kepala daerah dan wakil kepala daerah pilihannya. *Kedua*, adanya azas-azas pemilihan yang demokratis yaitu azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. *Ketiga*, diselenggarakan oleh lembaga independen yang mandiri dan bebas dari intervensi pihak manapun. *Keempat*, adanya rekrutmen politik yang terbuka dengan diberikannya kesempatan kepada calon independen melalui partai politik ataupun perseorangan untuk berkompetisi. *Kelima*, adanya akuntabilitas publik baik terhadap proses/tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah maupun terhadap aparat penyelenggara pemilu kepala daerah langsung. *Keenam*, adanya mekanisme pengawasan oleh panitia pengawas dan auditor publik. *Ketujuh*, adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam menangani sengketa pemilu kepala daerah. Namun perlu dipahami bahwa dengan adanya peluang tersebut bukan berarti pemilu kepala daerah langsung dengan sendirinya menjamin (*taken for granted*) lahirnya kepemimpinan daerah yang kapabel, kredibel, dan akuntabel atau dengan kata lain pemilu kepala daerah langsung juga tidak serta merta menciptakan situasi kondusif bagi peningkatan demokrasi itu sendiri dan demokratisasi di daerah.

Lebih jauh, apabila membicarakan pemilu kepala daerah langsung pada hakikatnya berhubungan dengan konsep desentralisasi politik. Smith (1985) menegaskan bahwa peranan desentralisasi politik bagi masyarakat lokal tercermin dalam penerapan nilai-nilai demokratis diantaranya *political equality*, *accountability*, dan *responsiveness*. Lebih lanjut diungkapkan Smith bahwa salah satu tujuan desentralisasi politik adalah terciptanya *political equality* di tingkat lokal. *Political equality* memberikan kontribusi pada penguatan demokrasi lokal dimana masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memberikan suaranya dalam pemilihan dan pengambilan keputusan politik, membentuk asosiasi politik

dan menggunakan hak kebebasan berbicara. Kemudian nilai akuntabilitas akan tercermin dari aktifitas-aktifitas politik yang melekat di dalam penyelenggaraan pemilihan, pembuatan peraturan, debat publik, dan menutup jurang pemisah antara warga negara dan pemerintah serta memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan keluhan dan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pemerintah. Nilai *responsiveness*, yang merupakan nilai terakhir desentralisasi menurut Smith menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah atau penyelenggara proses politik untuk melayani apa yang diinginkan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Masalah penelitian ini dianalisis sesuai dengan dua fokus penelitian, yaitu: (1) bentuk perilaku non-voting; dan (2) penyebab terjadinya perilaku non-voting yang ditinjau dari faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik, dan faktor status sosial ekonomi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive*, dengan pertimbangan jumlah pemilih di kecamatan ini adalah yang terbesar dibandingkan kecamatan lainnya. Disamping itu jumlah golput juga yang terbesar dibandingkan daerah pemilihan lain dan tingkat pendidikan masyarakatnya relatif lebih baik karena di kecamatan ini banyak berdomisili kalangan terdidik terutama pelajar dan mahasiswa.

Pemilihan informan dilakukan dengan cara *snowball sampling* yaitu memilih yang golput berdasarkan yang dalam hal ini terjaring sejumlah 20 orang informan dengan berbagai latar belakang sosial. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dan studi dokumentasi.

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui member check atau mengecek ulang secara garis besar beberapa hal yang telah disampaikan informan berdasarkan catatan di lapangan dan triangulasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Berdasarkan laporan kependudukan Kecamatan Koto Tengah tahun 2011 tercatat jumlah penduduk sebanyak 153.724 jiwa yang

Perilaku Non-Voting...

terdiri dari 74.505 laki-laki dan 79.219 perempuan. Dari keseluruhan jumlah penduduk, lebih jauh dapat dipaparkan bahwa menurut komposisi umur (usia) terdapat lebih dari 89.166 orang berada pada usia produktif (17-59 tahun) dan pada urutan kedua yaitu usia sekolah (< 16 tahun) sejumlah 41.857 orang, sementara sisanya penduduk berusia lebih dari 60 tahun.

Adapun mata pencaharian penduduk Kecamatan Koto Tangah sebahagian besar bekerja sebagai pedagang/wiraswasta, nelayan dan petani. Namun ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dosen, guru, pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga (Data dari Kecamatan Koto Tangah). Jika ditinjau dari segi pendidikan, penduduk kecamatan ini tergolong berpendidikan menengah ke atas.

Penduduk tamatan akademi/perguruan tinggi dan SMA sejumlah 65%, tamatan SMP 13%, tamat SD 14% dan tidak tamat SD sejumlah 8%. Kehidupan sosial penduduk Kecamatan Koto Tangah sebagaimana wilayah Minangkabau lainnya ditata berdasarkan prinsip-prinsip sistem matrilineal yang merupakan satu-satunya etnik penganut sistem matrilineal di Indonesia.

Sebagian besar masyarakat Koto Tangah tidak ikut memilih baik dalam pemilu legislatif maupun dalam pemilu kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2008 2013, sebagaimana ditunjukkan oleh rekapitulasi jumlah pemilih yang terdaftar, menggunakan hak pilih, dan yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Padang berikut ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Pemilih Terdaftar, Menggunakan dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Padang

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih			% yang tidak menggunakan hak pilih
		Terdaftar	Menggunakan hak pilih	Tidak menggunakan hak pilih	
1.	Padang Barat	35.590	21.196	15.394	57,93%
2.	Padang Utara	43.903	24.505	19.398	55,82%
3.	Koto Tangah	105.224	66.093	39.131	62,81%
4.	Nanggalo	36.973	23.128	13.845	62,55%
5.	Kuranji	80.412	51.698	28.714	64,29%
6.	Pauh	35.517	22.424	13.093	63,14%
7.	Padang Timur	54.864	34.049	20.815	62,06%
8.	Padang Selatan	40.794	26.503	14.291	64,96%
9.	Bungus Teluk Kabung	14.789	10.768	4.021	72,81%
10.	Lubuk Kilangan	31.174	20.306	10.868	65,13%
11.	Lubuk Begalung	62.774	47.556	20.218	70,16%
Jumlah		548.014	348.226	199.788	---

Sumber : KPU Kota Padang, 2009

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan Tertinggi	Penghasilan	Pengalaman Organisasi
1.	Pegawai Swasta	Lk.	41	S1	Tinggi	HMI
2.	Dosen	Lk.	47	S2	Tinggi	AIPI
3.	Pedagang	Pr.	52	SMA	Sedang	Muhammadiyah
4.	Pedagang	Pr.	45	S1	Tinggi	Majelis Taklim
5.	Ibu Rumah Tangga	Pr.	48	SMA	Sedang	Majelis Taklim
6.	Pedagang	Lk.	50	PGA	Tinggi	Asosiasi Keluarga Listrik Indonesia
7.	Mahasiswa	Pr.	21	SMA	Cukup	BEM Universitas
8.	PNS	Lk.	54	S1	Tinggi	Pengurus RT
9.	Tukang Ojek	Lk.	39	SMP	Kurang	---
10.	Nelayan	Lk.	37	SMP	Kurang	Organisasi Nelayan
11.	Guru	Pr.	47	S1	Tinggi	Pengurus Aisyiah
12.	PNS	Lk.	45	S1	Tinggi	---
13.	Pedagang	Lk.	45	S1	Tinggi	---
14.	Nelayan	Lk.	42	SMP	Kurang	Organisasi Nelayan
15.	Wiraswasta	Lk.	55	SD	Tinggi	Pengurus RT
16.	Ibu Rumah Tangga	Pr.	50	SD	Kurang	Majelis Taklim
17.	Pedagang	Pr.	42	SD	Kurang	Majelis Taklim
18.	Mahasiswa	Lk.	20	SMA	Kurang	Pramuka
19.	Dosen	Lk.	42	S2	Tinggi	HMI
20.	PNS	Lk.	49	S2	Tinggi	AIPI

Sumber : Diolah dari data primer

Informan penelitian dipilih secara *snowball sampling* pada area penelitian yang tersebar di 13 kelurahan pada Kecamatan Koto Tengah. Berdasarkan kejenuhan informasi maka di dapat 20 informan dengan karakteristik sebagaimana terungkap melalui tabel 2.

Dari tabel di atas terungkap variasi pekerjaan informan, dimana pekerjaan terbanyak informan adalah PNS (termasuk dosen dan guru) sejumlah 6 orang (30%), pedagang 5 orang (25%), selanjutnya ibu rumah tangga, mahasiswa, pegawai swasta (termasuk wira-swasta), nelayan masing-masing 2 orang (10%), dan tukang ojek 1 orang (5%). Sementara itu dari sisi jenis kelamin, informan didominasi oleh laki-laki yaitu sejumlah 13 orang (65%) dan 7 orang (35%) lainnya adalah perempuan.

Apabila disigi dari segi usia, maka dapat dinyatakan bahwa semua informan berada dalam usia produktif yaitu antara 20-55 tahun. Kemudian dari segi penghasilan terlihat cukup variatif. Penghasilan informan rata-rata cukup baik dengan proporsi 11 orang (55%) pada kategori tinggi, 6 orang (30%) pada kategori kurang, dan 3 orang lainnya (15%) pada kategori sedang. Dapat dinyatakan di sini bahwa pengkategorian penghasilan dari

mahasiswa berdasarkan pada jumlah pemberian orang tuanya maupun hasil dari pekerjaannya sendiri. Kemudian ditinjau dari pengalaman berorganisasi ternyata hanya 2 orang (10%) informan saja yang tidak mempunyai pengalaman berorganisasi, sedangkan mayoritas yaitu 18 orang (90%) memiliki pengalaman berorganisasi.

Mayoritas informan penelitian yaitu sejumlah 14 orang (70%) bentuk perilaku non-votingnya adalah tidak menghadiri tempat pemungutan suara saat pemilu kepala daerah langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008 – 2013 walaupun dengan alasan yang berbeda. Kalangan pedagang, nelayan, wira-swasta, tukang ojek, dan ibu rumah tangga beralasan tidak hadir karena alasan-alasan ekonomi. Sementara itu kalangan informan mahasiswa sudah berniat memilih golput sejak awal dan merasa tidak penting untuk hadir ke tempat pemungutan suara. Sedangkan sebanyak 6 orang informan lainnya (30%) memilih untuk menghadiri tempat pemungutan suara, namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar. Tindakan yang dilakukan dalam bentuk mencoblos lebih dari satu calon atau mencoblos di luar gambar calon.

Tabel 3. Bentuk Perilaku Non-voting Informan Penelitian

No	Pekerjaan	Bentuk Perilaku Non-voting
1.	Pegawai Swasta	Tidak menghadiri tempat pemungutan suara.
2.	Dosen	Menghadiri tempat pemungutan suara, namun tidak menggunakan hak pilih secara benar.
3.	Pedagang	Tidak menghadiri tempat pemungutan suara.
4.	Pedagang	Tidak menghadiri tempat pemungutan suara.
5.	Ibu Rumah Tangga	Tidak menghadiri tempat pemungutan suara.
6.	Pedagang	Tidak menghadiri tempat pemungutan suara.
7.	Mahasiswa	Tidak menghadiri tempat pemungutan suara.
8.	PNS	Menghadiri tempat pemungutan suara, namun tidak menggunakan hak pilih secara benar.
9.	Tukang Ojek	Tidak menghadiri tempat pemungutan suara.
10.	Nelayan	Tidak menghadiri tempat pemungutan suara.
11.	Guru	Menghadiri tempat pemungutan suara, namun tidak menggunakan hak pilih secara benar.
12.	PNS	Menghadiri tempat pemungutan suara, namun tidak menggunakan hak pilih secara benar.
13.	Pedagang	Tidak menghadiri tempat pemungutan suara.
14.	Nelayan	Tidak menghadiri tempat pemungutan suara.
15.	Wiraswasta	Tidak menghadiri tempat pemungutan suara.
16.	Ibu Rumah Tangga	Tidak menghadiri tempat pemungutan suara.
17.	Pedagang	Tidak menghadiri tempat pemungutan suara.
18.	Mahasiswa	Tidak menghadiri tempat pemungutan suara.
19.	Dosen	Menghadiri tempat pemungutan suara, namun tidak menggunakan hak pilih secara benar.
20.	PNS	Menghadiri tempat pemungutan suara, namun tidak menggunakan hak pilih secara benar.

Perilaku Non-Voting...

Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Non-voting di Kecamatan Koto Tengah

Faktor Psikologis

Terdapat dua kriteria untuk menggambarkan karakter psikologis yang melatarbelakangi orang tidak memilih. *Pertama*, berdasarkan ciri atau tipe kepribadian non-voter. Hal ini bisa dilihat dari kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tidak acuh, kurang mempunyai tanggung jawab dan ketidakmampuannya memimpin lingkungan sekitarnya (*personal effectiveness*). *Kedua*, berdasarkan orientasi kepribadian non-voter. Seorang non-voter digambarkan sebagai seseorang yang menunjukkan karakter apatis, anomi, dan alienasi.

Berdasarkan faktor psikologis ini, temuan penelitian menunjukkan dari 20 orang informan semuanya memiliki ciri-ciri kepribadian yang toleran baik terhadap urusan-urusan umum kemasyarakatan atau masalah-masalah kenegaraan. Semua informan tersebut mengakui bahwa selama ini mereka sangat peduli dalam urusan-urusan kemasyarakatan maupun untuk kepentingan umum walaupun dengan intensitas yang berbeda. Beberapa dari informan mengaku selalu berpartisipasi dalam urusan-urusan kemasyarakatan di tempat tinggalnya dan beberapa lainnya karena kesibukan mereka mencari nafkah sehingga tidak punya waktu untuk hal-

hal yang menjadi tanggung jawabnya. Namun mereka menggantinya pada waktu dan bentuk yang lain.

Untuk lebih jelasnya ciri kepribadian dan orientasi kepribadian masing-masing informan dapat dilihat pada tabel 4.

Berdasarkan data pada tabel sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa non-voter di Kecamatan Koto Tengah bersikap tidak otoriter dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dengan orientasi kepribadian yang bervariasi. Kelompok informan yang kurang mendapat sosialisasi politik memiliki kecenderungan yang apatis dan anomi dalam kehidupan politik, sedangkan informan yang cukup melek politik tidak memiliki kecenderungan kepribadian yang apatis.

Faktor Sistem Politik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan merasa memang ada kebaikan pada pemilihan kepala daerah langsung karena masyarakat dipercaya untuk memilih dan tidak diwakilkan lagi kepada anggota legislatif daerah. Namun para informan menyangkal ketika ditanya apakah perubahan sistem pemilihan kepala daerah dapat menghasilkan kepemimpinan yang diharapkan.

Tabel 4. Penyebab Non-voting di Kecamatan Koto Tengah Ditinjau dari Faktor Psikologis dalam Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Periode 2008-2013

No.	Pekerjaan	Faktor Psikologis		
		Ciri/Tipe Kepribadian		Orientasi Kepribadian
		Otoriter/Tidak	Toleran/Tidak	
1.	Pegawai Swasta.	Tidak otoriter.	Toleran.	Apatis/anomi.
2.	Dosen.	Tidak otoriter.	Toleran.	Tidak apatis.
3.	Pedagang.	Tidak otoriter.	Toleran.	Apatis/anomi.
4.	Pedagang.	Tidak otoriter.	Toleran.	Apatis/anomi.
5.	Ibu Rumah Tangga.	Tidak otoriter.	Toleran.	Apatis/anomi.
6.	Pedagang.	Tidak otoriter.	Toleran.	Apatis/anomi.
7.	Mahasiswa.	Tidak otoriter.	Toleran.	Tidak apatis.
8.	PNS.	Tidak otoriter.	Toleran.	Tidak apatis.
9.	Tukang Ojek.	Tidak otoriter.	Toleran.	Apatis/anomi.
10.	Nelayan.	Tidak otoriter.	Toleran.	Apatis/anomi.
11.	Guru.	Tidak otoriter.	Toleran.	Tidak apatis.
12.	PNS.	Tidak otoriter.	Toleran.	Tidak apatis.
13.	Pedagang.	Tidak otoriter.	Toleran.	Apatis/anomi.
14.	Nelayan.	Tidak otoriter.	Toleran.	Apatis/anomi.
15.	Wiraswasta.	Tidak otoriter.	Toleran.	Apatis/anomi.
16.	Ibu Rumah Tangga.	Tidak otoriter.	Toleran.	Apatis/anomi.
17.	Pedagang.	Tidak otoriter.	Toleran.	Apatis/anomi.
18.	Mahasiswa.	Tidak otoriter.	Toleran.	Tidak apatis.
19.	Dosen	Tidak otoriter.	Toleran.	Tidak apatis.
20.	PNS.	Tidak otoriter.	Toleran.	Tidak apatis.

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2013.

Tabel 5. Penyebab Non-voting Di Kecamatan Koto Tengah Ditinjau dari Faktor Sistem Politik dalam Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008-2013

No.	Pekerjaan	Dapat-tidaknya Informan menanggapi kinerja sistem politik.
1.	Pegawai Swasta.	Dapat menanggapi walaupun tidak mendalam.
2.	Dosen.	Dapat menanggapi dengan kritis dan analitis.
3.	Pedagang.	Dapat menanggapi walaupun tidak mendalam.
4.	Pedagang.	Dapat menanggapi walaupun tidak mendalam.
5.	Ibu Rumah Tangga.	Dapat menanggapi walaupun tidak mendalam.
6.	Pedagang.	Dapat menanggapi walaupun tidak mendalam.
7.	Mahasiswa.	Dapat menanggapi dengan kritis dan analitis.
8.	PNS.	Dapat menanggapi dengan kritis dan analitis.
9.	Tukang Ojek.	Tidak dapat menanggapi.
10.	Nelayan.	Cukup dapat menanggapi walaupun tidak mendalam.
11.	Guru.	Dapat menanggapi dengan kritis dan analitis.
12.	PNS.	Dapat menanggapi dengan kritis dan analitis.
13.	Pedagang.	Dapat menanggapi dengan kritis dan analitis.
14.	Nelayan.	Tidak dapat menanggapi.
15.	Wiraswasta.	Cukup dapat menanggapi walaupun tidak mendalam.
16.	Ibu Rumah Tangga.	Kurang dapat menanggapi.
17.	Pedagang.	Kurang dapat menanggapi.
18.	Mahasiswa.	Dapat menanggapi dengan baik.
19.	Dosen	Dapat menanggapi dengan kritis dan analitis.
20.	PNS.	Dapat menanggapi dengan baik.

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2013.

Untuk menjangkau pendapat informan tentang mengapa ia tidak memilih dalam pemilu kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2008 - 2013 jika dihubungkan dengan faktor sistem politik terutama kinerja sistem politik dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema pertanyaan.

Pertama, tentang kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. *Kedua*, tentang kinerja lembaga legislatif. *Ketiga*, tentang kinerja lembaga peradilan. *Keempat*, tentang partai politik. *Kelima*, tentang kinerja birokrasi dalam melaksanakan pelayanan publik. *Keenam*, tentang kinerja LSM ataupun kelompok-kelompok kepentingan. Keenam hal tersebut paling tidak mewakili pencerminan informan terhadap sistem politik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Grabiell A. Almond bahwa suatu sistem politik pada umumnya memiliki enam komponen (Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrews, 1992).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan yang berasal dari tingkat pendidikan yang tinggi seperti dosen, guru, PNS, dan mahasiswa serta beberapa informan pedagang dapat menjelaskan dengan baik tentang kinerja pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi politik yang memadai termasuk tingkat kedalaman informasi

politik yang diterima membuat para informan dapat mengkritisi dengan lugas kinerja pemerintahan.

Informan dari kalangan terdidik dapat memberikan tanggapannya terhadap sistem politik secara keseluruhan dengan kritis. Berbeda dengan informan dari nelayan, tukang ojek dan ibu rumah tangga misalnya. Para informan dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, tanggapan yang diberikan tidak terlalu mendalam. Tanggapan yang diberikan oleh informan setelah dikelompokkan dapat digambarkan sebagaimana diungkapkan melalui tabel 5.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan dapat menjelaskan dengan baik bagaimana kinerja sistem politik yang ada. Pendapat/tanggapan mereka didasarkan realitas yang dirasakan sehari-hari. Kekritisan tanggapan disampaikan oleh beberapa informan dosen yang pada hakekatnya berlatar belakang pendidikan dan organisasi keilmuan bidang politik/pemerintahan.

Faktor Kepercayaan Politik

Secara teoritis, kepercayaan politik seringkali dapat menjelaskan perilaku non-voting seseorang, karena ketidakhadiran dalam

Perilaku Non-Voting...

pemilu merupakan refleksi dari ketidakpercayaan atau rendahnya kepercayaan politik seseorang (M. Asfar, 1998). Hasil penelitian menunjukkan masing-masing informan mempunyai tingkat ketidakpercayaan politik yang tidak sama. Informan dari kalangan PNS, dosen, guru dan beberapa pedagang menjawab pertanyaan dengan jawaban sebagian besar tidak percaya. Sedangkan informan dari kalangan mahasiswa menjawab pertanyaan dengan jawaban tidak percaya sama sekali. Sementara informan yang lainnya banyak yang menjawab tidak tahu.

Faktor Status Sosial Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan para informan sebagai non-voter memiliki tingkat pendidikan yang beragam. Sebagian besar tergolong pada pendidikan menengah dan tinggi yaitu sarjana 6 orang (30%), pascasarjana 3 orang (15%), SMA-sederajat 5 orang (25%). Sementara itu pendidikan dasar sejumlah 6 orang (30%), masing-masing 3 orang untuk SMP dan SD. Dengan demikian dari segi pendidikan, dapat dinyatakan bahwa secara umum para informan adalah orang-orang yang terdidik.

Kemudian jika ditinjau dari segi proses sosialisasi politik yang dialami, maka informan yang berpendidikan menengah dan tinggi berada dalam kategori melek politik. Sementara

informan yang berpendidikan dasar mengalami intensitas yang rendah dalam sosialisasi politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa informan yang berpendidikan tinggi cenderung tidak memilih dengan alasan kekritisannya dan ketidakpercayaannya terhadap pemerintah dan kinerja sistem politik.

Selanjutnya dari sisi penghasilan, temuan penelitian menunjukkan bahwa informan dengan penghasilan dalam kategori tinggi dan cukup, sebagian besar dari mereka cenderung melakukan tindakan tidak memilih karena mereka merasa kecewa dengan kondisi riil politik yang terjadi. Terutama dengan kinerja sistem politik atau pemerintahan. Dengan penghasilan yang dimiliki, mereka mampu mengakses informasi politik dari berbagai media, misalnya berlangganan koran, internet, majalah ataupun membeli buku-buku pengetahuan politik populer.

Sementara itu dari segi pekerjaan informan, temuan penelitian menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang bersentuhan dengan kebijakan pemerintah seperti guru, PNS, dosen ataupun mahasiswa, ternyata banyak dari kalangan mereka yang tidak memilih. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan untuk selalu membaca koran, mendengar berita atau mengakses berita melalui internet membuat mereka memahami peristiwa-peristiwa politik dan menaruh ketidakpercayaan pada kinerja pemerintahan.

Tabel 6. Penyebab Non-voting Di Kecamatan Koto Tengah Ditinjau dari Faktor Kepercayaan Politik dalam Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008-2013

No.	Pekerjaan	Tingkat kepercayaan politik
1.	Pegawai Swasta.	Cukup percaya pada sistem yang ada saat ini.
2.	Dosen.	Tidak percaya pada sistem yang ada saat ini.
3.	Pedagang.	Tidak percaya pada sistem yang ada saat ini.
4.	Pedagang.	Kurang percaya pada sistem yang ada saat ini.
5.	Ibu Rumah Tangga.	Tidak percaya pada sistem yang ada saat ini.
6.	Pedagang.	Tidak percaya pada sistem yang ada saat ini.
7.	Mahasiswa.	Tidak percaya pada sistem yang ada saat ini.
8.	PNS.	Tidak percaya pada sistem yang ada saat ini.
9.	Tukang Ojek.	Tidak tahu.
10.	Nelayan.	Tidak tahu.
11.	Guru.	Tidak percaya pada sistem yang ada saat ini.
12.	PNS.	Tidak percaya pada sistem yang ada saat ini.
13.	Pedagang.	Tidak percaya pada sistem yang ada saat ini.
14.	Nelayan.	Tidak tahu.
15.	Wiraswasta.	Cukup percaya pada sistem yang ada saat ini.
16.	Ibu Rumah Tangga.	Tidak tahu.
17.	Pedagang.	Tidak tahu.
18.	Mahasiswa.	Tidak percaya sama sekali pada sistem yang ada saat ini.
19.	Dosen	Tidak percaya sama sekali pada sistem yang ada saat ini.
20.	PNS.	Tidak percaya sama sekali pada sistem yang ada saat ini.

Sumber : Diolah dari data primer

Berbeda dengan informan yang pekerjaannya tergolong pada penghasilan rendah, temuan penelitian menunjukkan bahwa mereka berperilaku tidak memilih karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka mengutamakan tuntutan mencari nafkah pada hari pemilihan. Kalau tidak demikian, maka mereka merasa rugi bila dibandingkan dengan kehadiran mereka di tempat pemilihan yang menurut mereka tidak ada untungnya sama sekali.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan terdapat dua bentuk perilaku non-voting dari informan penelitian, yaitu : (1) tidak datang ke tempat pemungutan suara; dan (2) datang ke tempat pemungutan suara tetapi tidak menggunakan hak suaranya secara benar. Mayoritas informan penelitian (70%) diantaranya tidak datang ke tempat pemungutan suara. Mereka adalah pedagang, nelayan, tukang ojek, dan ibu rumah tangga. Sementara 30% informan lainnya yaitu para PNS, baik itu guru, dosen maupun PNS lainnya menghadiri tempat pemungutan suara, hanya saja mereka tidak menggunakan hak suaranya secara benar.

Bila dicermati lebih lanjut sebahagian besar informan beralasan tidak datang ke tempat pemungutan suara karena alasan ekonomi dan merasa pemilihan kepala daerah sebagai hal yang tidak begitu penting. Sementara yang lainnya beralasan datang ke tempat pemungutan suara agar masyarakat tidak memandang *negatif* atau dicap sebagai golput. Hal ini bisa dipahami karena informan tersebut berasal dari kalangan PNS. Walaupun demikian bentuk perilaku tidak memilih yang mereka lakukan tetap mencoblos dengan cara tidak benar (menggunakan hak suaranya secara tidak benar).

Lebih lanjut temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi atau sebagai penyebab orang tidak memilih yaitu : (1) faktor psikologis ; (2) faktor sistem politik ; (3) faktor kepercayaan politik ; dan (4) faktor latar belakang status sosial ekonomi. Ditinjau dari faktor psikologis pemilih, temuan penelitian menunjukkan: *Pertama*, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian, semua informan memiliki ciri-ciri kepribadian yang toleran, baik terhadap urusan-urusan umum kemasyarakatan di tempat mereka tinggal maupun terhadap masalah-masalah kenegaraan. Semua informan mengakui selama

ini mereka sangat peduli dalam urusan-urusan di luar pribadi mereka, walaupun dengan intensitas yang berbeda. *Kedua*, bila dilihat dari kemampuan informan menjadi penggerak atau pemimpin di lingkungan terkecilnya seperti lingkungan tempat tinggal dan lingkungan tempat bekerja, sebahagian besar informan menjadi penggerak di organisasi tempat dia bekerja atau lingkungan tempat tinggal. Dari dua kriteria ciri kepribadian terlihat keseluruhan informan adalah orang-orang yang ramah, toleran, dan peduli dengan kondisi-kondisi sekitarnya. Hal ini ternyata bertentangan dengan teori yang mengatakan bahwa orang yang ciri kepribadiannya tidak toleran, otoriter, tak acuh, kurang mempunyai tanggung jawab pribadi cenderung tidak memilih (David Moon dalam Sri Yanuarti, 2009).

Hal berikutnya dari faktor psikologis adalah mengenai orientasi kepribadian, temuan penelitian menunjukkan bahwa para informan penelitian memiliki orientasi kepribadian yang variatif. Informan dari pedagang, nelayan, wiraswasta, ibu rumah tangga dan pegawai swasta, serta tukang ojek dapat dikelompokkan kepada kategori orientasi kepribadian apatis dan anomi. Secara umum informan ini menunjukkan ketidaktertarikan terhadap persoalan politik, tidak ada minat dan menganggap aktifitas politik merupakan kegiatan yang tidak berguna. Sementara itu informan lainnya seperti guru, PNS, dosen, dan mahasiswa tidak satupun dari mereka menunjukkan orientasi kepribadian yang apatis. Informan kelompok ini mengaku sangat tertarik dan mempunyai perhatian besar pada persoalan-persoalan politik.

Orientasi kepribadian seperti ini sangat tergantung kepada pengalaman sosialisasi politik masing-masing. Menurut Rush dan Althoff (2003) sosialisasi politik merupakan suatu proses memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gerak gejala politik. Dalam sosialisasi politik terdapat dua hal penting yaitu : *Pertama*, tentang proses transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan perilaku esensial. *Kedua*, tentang tujuan dari sosialisasi politik itu adalah agar masyarakat biasa mampu secara aktif berpartisipasi dalam politik (Damsar, 2010).

Informan penelitian yang mengalami proses sosialisasi politik cenderung meleak politik dan tidak apatis. Sementara itu informan yang kurang tersosialisasi dalam kehidupan

Perilaku Non-Voting...

politik, sebaliknya cenderung memiliki orientasi kepribadian apatis dan anomi. Kondisi ini apabila dibiarkan terus tentu akan berdampak pada aktifitas-aktifitas politik lainnya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor psikologis yang menyebabkan terjadinya non-voting di Kecamatan Koto Tangah bila dilihat dari ciri kepribadian, ternyata semua informan tidak otoriter dan sangat toleran. Kenyataan ini membantah teori yang mengatakan bahwa perilaku non-voting dari faktor psikologis disebabkan karena orientasi kepribadiannya otoriter dan tidak toleran/tidak acuh serta tidak punya tanggung jawab pribadi. Demikian juga dari orientasi kepribadian, sebahagian informan cenderung tidak apatis, sedangkan sebahagian lainnya apatis dan anomi. Dengan kata lain dari segi orientasi kepribadian, sebahagian besar informan tidak apatis dan sikap ini mendorong mereka tidak memilih. Di sisi lain justru sikap apatis dan anomi juga dijadikan alasan utama informan yang berpendidikan rendah untuk tidak memilih.

Selanjutnya penyebab non-voting bila dilihat dari faktor sistem politik, temuan penelitian menunjukkan bahwa informan yang berasal dari kalangan terdidik sanggup mengkritisi kinerja pemerintah, selanjutnya persepsi serta evaluasi yang mereka berikan terhadap politik/pemerintah-lah yang menjadi faktor yang mendorong untuk melakukan tindakan non-voting. Kekecewaan mereka terhadap kinerja sistem politik/pemerintahan mengakibatkan sinisme yang berakhir pada tindakan tidak memilih.

Walaupun sesungguhnya para informan menyadari bahwa pemilihan kepala daerah langsung merupakan suatu kemajuan dalam berdemokrasi, namun realitas yang mereka rasakan tidak jauh berbeda dengan praktek pemilihan kepala daerah sebelumnya. Masih ditemui adanya kecurangan-kecurangan dalam proses dan hasil pemilu membuat mereka merasa perubahan sistem tidak serta merta menggaransi dihasilkannya kepala daerah yang ideal untuk Kota Padang.

Kemudian bila dicermati penyebab informan tidak memilih dari faktor kepercayaan politik, hasil penelitian menunjukkan tingkat kepercayaan informan yang tidak sama. Informan dari kalangan PNS, dosen, guru dan beberapa pedagang yang berpendidikan tinggi mengaku tidak percaya pada format sistem

pemilihan kepala daerah saat itu berlangsung dengan jujur dan adil serta transparan untuk selanjutnya menghasilkan pemimpin yang diharapkan masyarakat. Disamping itu juga diikuti oleh ketidakpercayaan pada janji-janji masa kampanye, hasil penghitungan suara, maupun mengenai proses pemungutan suara itu sendiri. Sementara informan mahasiswa justru merasa tidak percaya sama sekali terhadap sistem yang ada. Kepercayaan politik seringkali dapat menjelaskan perilaku non-voting seseorang. Dalam konteks semacam ini, perilaku non-voting merupakan bentuk protes dari ketidakpercayaan orang terhadap sistem politik yang sedang berjalan (M. Asfar, 1998). Kepercayaan pada pemerintah (sistem politik) adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak (Ramlan Surbakti, 1992).

Kemudian faktor berikutnya yang dapat menjelaskan mengapa informan penelitian berperilaku tidak memilih pada pemilu kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008-2013 adalah faktor latar belakang status sosial ekonomi. Faktor ini dimaksudkan seberapa jauh tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan informan mempengaruhi mereka untuk tidak memilih.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa informan yang sebahagian besar kalangan terdidik, terlihat mampu mempelajari kehidupan politik dalam konteks ini adalah pemilu kepala daerah. Realitas pelaksanaan pemilu yang sarat dengan kecurangan, *money politic*, konflik dan kekurangsiapan dari segi penyelenggara memicu mereka untuk cenderung tidak memilih. Kekritisan dan ketidakpercayaannya pada pemerintah dan kinerja sistem politik menjadi faktor utama bagi mereka untuk berperilaku tidak memilih. Hal ini bertentangan dengan pendapat Verba dan Almond (1990) bahwa di tiap negara yang masyarakatnya berpendidikan lebih tinggi lebih sering menyatakan kesetiaan mereka pada norma-norma partisipasi.

Kemudian dari segi penghasilan, temuan penelitian menunjukkan bahwa informan yang berpenghasilan dengan kategori tinggi dan cukup tidak menjadikan kondisi penghasilan mereka sebagai penyebab mereka tidak memilih. Melainkan penghasilan mereka yang memadai tersebut menjadikan mereka bisa memiliki cukup informasi untuk menilai kinerja pemerintah dan menjadikannya sebagai alasan

tidak memilih. Sementara informan berpenghasilan kurang menjadikan hal ini sebagai penyebab mengapa mereka tidak datang pada saat pemilihan, ditambah lagi sebagian dari mereka ada yang mampu menilai kinerja pemerintah walaupun dengan pengungkapan yang seadanya.

Dalam kehidupan, status sosial ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk melakukan kegiatan termasuk kegiatan politik. Dengan status sosial ekonomi yang mapan, seseorang dapat termotivasi untuk menggunakan hak pilihnya (Miriam Budiardjo, 1994). Jika dicermati temuan penelitian menunjukkan bahwa informan yang memiliki status sosial ekonomi tinggi ternyata berperilaku tidak memilih. Temuan penelitian ternyata tidak sejalan dengan pendapat Sudijono Sastroatmodjo (1995) yang mengatakan “bahwa seseorang yang memiliki status sosial ekonomi tinggi dipandang lebih cenderung untuk berpartisipasi politik secara aktif, dibandingkan dengan status sosial ekonominya yang lebih rendah.”

Selanjutnya untuk jenis pekerjaan, temuan penelitian menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang bersentuhan dengan kebijakan pemerintah seperti guru, PNS, dosen, ataupun mahasiswa biasanya memiliki pengaruh atas memilih atau tidaknya dalam pemilu. Secara teoritis, para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja bukan pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah (M. Asfar, 1998). Temuan penelitian menunjukkan hal yang berlainan. Informan dari guru, PNS, dosen, ataupun mahasiswa ternyata memilih untuk tidak hadir di tempat pemungutan suara saat pemilu kepala daerah berlangsung.

Dari keempat faktor yang turut mempengaruhi seseorang untuk berperilaku tidak memilih, faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap informan untuk tidak memilih adalah faktor sistem politik dan kepercayaan politik. Temuan ini menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda pada golput pada masa Orde Baru. Ternyata perubahan sistem politik tidak serta merta merubah pandangan orang tentang kinerja sistem politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Kemudian bila dilihat benang merah atau keterkaitan dari keempat faktor yang mem-

pengaruhi seseorang untuk berperilaku non-voting adalah dorongan ketidakpuasan para non-voter terhadap kinerja pemerintah. Ketidakpercayaan terhadap kejujuran penyelenggara pemilihan kepala daerah langsung, juga menjadi faktor penentu berikutnya. Kondisi ini diperburuk oleh sikap non-voter yang lebih mementingkan pekerjaan/mencari penghasilan untuk kebutuhan keluarga (faktor ekonomi). Ditambah lagi dengan orientasi kepribadian yang cenderung apatis dan anomi terhadap kehidupan politik, walaupun pada dasarnya mereka cenderung berkepribadian toleran dan tidak anomi.

Simpulan

Terdapat dua bentuk perilaku non-voting dalam pemilu kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008- 2013 di Kecamatan Koto Tengah, yaitu: (1) tidak datang ke tempat pemungutan suara; dan (2) datang ke tempat pemungutan suara, tetapi tidak menggunakan hak suaranya secara benar.

Terdapat empat faktor penyebab terjadinya perilaku non-voting dalam pemilu kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008-2013 di Kecamatan Koto Tengah, yaitu: (1) faktor psikologis, (2) faktor sistem politik, (3) faktor kepercayaan politik, (4) faktor status sosial ekonomi

Ditinjau dari faktor psikologis, orientasi kepribadian non-voter cenderung apatis dan anomi terhadap kehidupan politik namun ciri kepribadian tidak otoriter dan toleran. Selanjutnya ditinjau dari faktor sistem politik, ternyata perilaku non-voting terjadi didorong oleh ketidakpuasan non-voter terhadap kinerja pemerintah, yang menurut mereka tidak membawa perubahan apa-apa terutama yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Sementara itu ditinjau dari faktor kepercayaan politik, sebahagian besar non-voter tidak percaya bahkan ada yang tidak percaya sama sekali terhadap proses dan hasil penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Sedangkan apabila ditinjau dari faktor latar belakang status sosial ekonomi, non-voter sebahagian besar adalah kalangan terdidik.

Daftar Rujukan

- Afan Gaffar. 1998. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al Rafni, dkk. 2009. *Desentralisasi Politik*:

Perilaku Non-Voting...

- Kajian Tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Sumatera Barat.* Laporan Penelitian Strategis Nasional – Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.
- Czudnowski, Moshe. 1975. “**Political Recruitment**” dalam **Fred I. Greenstein & Nelson Polsby**. *Handbook of Political Science* Vol.2.
- Damsar. 2010. **Pengantar Sosiologi Politik**. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Greenstein, Fred I (ed.). 1975. **Handbook of Political Science Vol.4**. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
- Joko J. Prihatmoko. 2005. **Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia**. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Wahid Hasyim dan Pustaka pelajar.
- KPUD Kota Padang. 2008. **Laporan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2008**.
- Lexy J. Moleong. 1998. **Metodologi Penelitian Kuantitatif**. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Asfar. 1998. **Perilaku Nonvoting di Bawah Sistem Kepartaian Hegemonik**. Tesis S2 – Pascasarjana Universitas Gadjahmada Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo. 1998. **Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai**. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Mohtar Mas’oed dan Collin MacAndrews. 1981. **Perbandingan Sistem Politik**. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- , 1992. **Perbandingan Sistem Politik**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huntington, Samuel P. & Joan M. Nelson. 1976. **No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries**. Massachusetts: Harvard University Press.
- Mufti Mubarak. 2005. **Sukses Pilkada**. Surabaya: PT. Java Pustaka Media Utama.
- Power, Timothy J. & Robert J. Timmos. 1995. *Compulsory Voting Invalid Ballots and Abstention in Brazil*. **Political Research Quarterly** Vol.48 No.3.
- Ramlan Surbakti. 1992. **Memahami Ilmu Politik**. Jakarta: Gramedia Widraswara Indonesia.
- Roth, David F. & Frank L. Wilson. 1976. **The Comparative Study of Politics**. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Rush, Michael & Phillip Althoff. 2005. **Pengantar Sosiologi Politik**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sherman, Arnold K. & Aliza Kolker. 1987. **The Social Bases of Politics**. California: A Division of Wodsworth Inc.
- Smith, Brian C. 1985. **Territory Dimension of State**. London: Mac Millan.
- Sri Yanuarti. 2009. *Golput dan Pemilu di Indonesia*”. **Jurnal Penelitian Politik** Vol.6 No.1. Jakarta: LIPI.
- Sudijono Sastroatmodjo. 1995. **Perilaku Politik**. Semarang: IKIP Semarang Press.
- UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Verba, Sidney, Kaylehman Scholozman and Henry E. Brady. 1995. **Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics**. Cambridge: Harvard University Press.